

MERANAP PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONFIGURASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN¹

Oleh: Dewi Gunawati²

ABSTRAK

This *paper focuses on grounding learning environmental education in the configuration of civic education. The design of this study are expected to produce outputs in the form of an enlightened method of learning (technological humanists). In more systematically, this paper is to review studies that assessed environmental education in the two different approaches, namely the study of pedagogy and approaches to citizenship. Citizenship education as a cultural and educational character have cultural values and national character which include: religious, honest, tolerance, discipline, hard work, creative, independent, democratic, curiosity, semanga nationality, patriotism, respect for achievement, communicative , peace-loving, likes to read, care for the environment, social care and responsibility so as to explain the Life Education environment, implementation of environmental education studies as a preparation in a position themselves as good citizens.*

KATA KUNCI: Pendidikan lingkungan hidup, Pendidikan Kewarganegaraan

¹ Artikel non penelitian

² Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Pengotoran air, tanah, berkurangnya sumber daya alam, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati menunjukkan bahwa degradasi lingkungan sudah mencapai taraf yang amat mengkhawatirkan dengan akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak terkendali. Fenomena diatas terjadi karena perilaku manusia yang melakukan intervensi terhadap alam sehingga menyebabkan dampak gangguan fungsi ekologi alam (Hidayat & Samekto, 1998).

Fenomena diatas terjadi karena tidak efektifnya pendidikan nilai yang ditunjukkan dalam bentuk sikap atau perilaku. Selain itu penyebab lain adalah kegagalan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan fungsinya sebagai pendidikan moral, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang selama ini berlangsung ternyata tidak berhasil menciptakan manusia bermoral sesuai misi dan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang Sisdiknas , UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pola pembangunan konvensional yang dianut masyarakat internasional selama bertahun-tahun tidak memuat

pertimbangan lingkungan. Pola pembangunan konvensional telah mengambil sumber daya alam yang begitu besar dengan teknologi dan proses yang begitu merusak ,sehingga timbul kerusakan yang bersifat global.

Dampak dari hasil “pendidikan lingkungan hidup” yang telah dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan belum banyak terlihat, baik pada masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya ,berbagai permasalahan lingkungan hidup yang berakar dari perilaku manusia masih sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan belum maksimalnya capaian hasil pendidikan ini diakui oleh menteri negara lingkungan hidup Indonesia yang menyatakan bahwa “materi dan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup tidak aplikatif, kurang mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di daerah masing-masing”. Hal ini secara tidak langsung merupakan indikasi bahwa secara umum konsepsi pendidikan lingkungan hidup di sekolah lebih banyak pada tatanan ide dan instrumental lingkungan hidup di sekolah. Oleh karena itu kajian terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup selama ini sangat perlu dilakukan, dalam arti bahwa kita perlu mengkaji setrategi pembelajaran dan penyediaan pengalaman belajar pada peserta didik dalam rangka mencari alternative bentuk model pembelajaran yang dianggap akan lebih efektif dari yang sebelumnya.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai memiliki esensi dan makna sebagai pendidikan moral, pendidikan akhlak atau pendidikan budi pekerti, yang semua itu bertujuan

membentuk pribadi anak, agar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan yang bersumber dari pendidikan nilai harus mengadopsi nilai-nilai moral yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai itu adalah nilai moral Pancasila. Lima sila itu merupakan nilai dasar yang dikembangkan secara dinamis menjadi nilai instrumental dan nilai rasional.

Nilai - nilai Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai lokal atau nilai-nilai budaya dimasyarakat Indonesia. Namun demikian tidak semua nilai-nilai lokal merujuk pada klasifikasi nilai moral yang menjadi isi dari pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai lokal. Untuk mengangkatnya sebagai sumber materi pelajaran maka nilai moral lokal perlu disistematisasi, dirancang disesuaikan dengan prosedur penyampaian bahan ajar selain itu juga perlu pengolahan bahan nilai lokal sesuai dengan usia, perkembangan kognitif dan kematangan anak didik (Winarno, 2011).

Pendekatan berbasis nilai (*value based approach*) merupakan salah satu pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berbasiskan nilai. Dalam pendekatan ini nilai-nilai yang ada perlu dijabarkan dalam bentuk norma yang dari pengembangan norma-norma inilah kita dapat menginginkan nilai-nilai apa yang hendak diajarkan pada anak.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bahan ajar yang mengembangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah

mewujudkan warga negara yang sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik serta kepekaan mengembangkan jati diri moral dan bangsa dengan menjaga dan peduli lingkungan hidup . Penanaman sikap tentang lingkungan hidup harus ditanamkan sejak dini, melalui jalur formal, informal maupun non formal. Peran pendidikan lingkungan memiliki arti penting untuk meningkatkan kesadaran, individu dan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar tercipta lingkungan yang berkualitas.

Pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan telah memberikan rambu-rambu kearah perlunya pengkajian terhadap strategi pembelajaran untuk mempersiapkan suatu model pembelajaran, khususnya bahan ajar berbasis lokal yang ditandai dengan terbukanya pintu bagi penerapan desentralisasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Namun pengembangan suatu model bahan ajar pendidikan lingkungan hidup hendaknya sesuai dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan bahwa materi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, kemampuan, minat dan kebutuhannya.

Sejalan dengan itu maka pengembangan materi bahan ajar dan strategi pendidikan lingkungan hidup harus mengacu pada karakteristik daerah yang bersangkutan, baik yang berkenaan dengan kondisi tentang alam, sumberdaya alam, social ekonomi, serta budaya masyarakatnya. Masalah-masalah yang berkenaan dengan sumber daya hendaknya selalu digambarkan melalui praktik ekologis yang serasi.

HAKIKAT PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Hendrawati, 2011).

Pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pendidikan lingkungan hidup menurut konvensi UNESCO di Tbilisi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari alternative atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup baru .

Adapun tujuan umum pendidikan lingkungan hidup menurut konferensi Tbilisi adalah : (1) untuk membantu

menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, social, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan; (2) untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, dan (3) untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi aspek : (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) kepedulian, (4) keterampilan, dan (5) partisipasi. *Internasional Working Meeting on Environment Education Inschool Curriculum*, dalam rekomendasinya mengenai pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup, menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan hendaknya merupakan suatu proses mengorganisasi nilai dan memperjelas konsep-konsep untuk membina keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menghargai antar hubungan manusia, kebudayaan, dan lingkungan fisiknya. Pendidikan lingkungan hidup harus juga diikuti dengan praktik pengambilan keputusan dan merumuskan sendiri cirri-ciri perilaku yang didasarkan pada isu-isu tentang kualitas lingkungan .

Dengan demikian, proses pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan selain memperluas wawasan kognitif hendaknya juga menyentuh ranah keyakinan ilmiah, sikap, nilai, dan perilaku. Tilaar juga menekankan hal yang senada, yakni hakikat pendidikan adalah proses

menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global.

RUANG LINGKUP PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

“Education is political, cultural and social action. It is bound up in the intreplay between state and civil society shaping who we are, what we do, how we think and speak; and, what we receive from and give to society. The business of education is the creation and recreation of culture, society and personal identity. Systems of education comprise networks of workers, practices and policies for nurturing learning capacity for the benefit of individuals and for the benefits of society. Education is seen both as a force for social change and as the vehicle for reproducing existing social hierarchies. (Monica McLean, 2006: 1)

Kutipan diatas mendeskripsikan paradigma pendidikan yang lazim disebut sebagai pendidikan kritis (*critical education*), pedagogi kritis (*critical pedagogy*), dan juga pendidikan transformatif (*transformative education*). Bahwa pendidikan bukanlah ruang yang bebas dari intervensi dan praktik politik, bahkan pendidikan adalah arena pertarungan pengetahuan, budaya dan nilai-nilai.

Menurut pandangan pakar hukum, Jurgen habermas, bahwa pendidikan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia, Dalam hal ini Habermas yang menggabungkan kajian epistemologi, psikologi, sosiologi, etika, filsafat dan politik sebagai fondasi bagi pandangan

optimistik dalam upaya mengembangkan kualitas hidup manusia.

Pada hakikatnya visi pendidikan lingkungan hidup adalah *“Terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, kesadaran dan keterampilan untuk berperan aktif dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.”*

Visi ini bertitik tolak dari latar belakang permasalahan pendidikan lingkungan hidup yang ada selama ini dan sejalan dengan filosofi pembangunan berkelanjutan yang menekankan bahwa pembangunan harus dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang serta melestarikan dan mempertahankan fungsi lingkungan dan daya dukung ekosistem.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu (Hendrawati, 2011):

1. Mengembangkan kebijakan pendidikan nasional yang berparadigma lingkungan hidup;
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pendidikan lingkungan hidup di pusat dan daerah;
3. Meningkatkan akses informasi pendidikan lingkungan hidup secara merata;
4. Meningkatkan sinergi antar pelaku pendidikan lingkungan hidup.

Mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta

memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup.

Sesuai dengan tujuan pendidikan lingkungan hidup, maka disusunlah kebijakan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendorong semua pihak berperan dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup untuk pelestarian lingkungan hidup.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian yang terkait dibidang ekonomi, social, politik, ekologi dalam masyarakat desa dan kota. dan yang paling utama adalah agar individu mempunyai pengetahuan sehingga akan termotivasi untuk ikut bertanggung jawab dalam menciptakan pola tingkah laku yang peduli lingkungan baik secara individual maupun kelompok. Lebih jelasnya bahwa tujuan lingkungan hidup terbagi dalam kategori:

1. *Awaraness to help social groups and individuals acquire an awaraness and sensitivity to the total environmeny and its alled problem (and/ or issues)*
2. *Sensivity to help social groups and individuals gain a variety of experiences in and acquire a basic understanding of the environment and its associated problem(and/ or issues)*
3. *Attitudes-to help social groups and individuals acquire a set of values and frrlings of concern for*

environmental improvement and protection (and/ or issues)

4. *Skill-to help social groups and individuals acquire skill for identifying and soving environmental problem and/ or issues)*
5. *Participation-to provide social groups and individuals with and opportunity to be actively involved at all levels in working toward resolution of environmental problem (and/ or issues)*

Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : Kep 07/MENLH/06/2005 – Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. Ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2005 di Jakarta. Tujuan Kesepakatan Bersama:

1. Kerjasama di antara kedua belah pihak dalam menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada peserta didik dan masyarakat
2. Mutu sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan dan pelestari lingkungan hidup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi:

1. Koordinasi dalam penyusunan program pendidikan lingkungan hidup jangka pendek, menengah dan panjang;
2. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup sebagai wadah/ sarana menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan;

3. Peningkatan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendidikan lingkungan hidup;
5. Peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan lingkungan hidup.

PENDEKATAN DAN METODE PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai sebuah upaya untuk mengubah cara pandang dan perilaku segenap komponen masyarakat agar memiliki kepedulian dan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya kelestarian lingkungan, kegiatan pendidikan lingkungan hidup memerlukan metode atau pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik persoalan dan kelompok sasaran yang dihadapi. Di bawah ini terdapat beberapa pendekatan atau metode yang umum digunakan dalam proses belajar mengajar :

1. Pendekatan Tatap Muka

Instruktur/ pengajar/ nara sumber bertemu secara langsung dengan para peserta (kelompok sasaran) pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan ini umumnya diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, kelas, kursus/pelatihan, seminar, dan lokakarya. Penerapan pendekatan tatap muka ini seringkali dilakukan dengan cara mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran. Adapun metode yang umum digunakan adalah:

- a. **Metode Ceramah**, umumnya dicirikan oleh situasi pembelajaran di mana instruktur/pengajar/nara sumber

aktif menyampaikan materi sedangkan peserta hanya mendengarkan (pasif)

- b. **Metode Diskusi**, yaitu suatu metode pembelajaran yang dicirikan oleh adanya interaksi yang intensif antara instruktur/pengajar/nara sumber dan peserta yang mana antara keduanya saling memberikan pertanyaan dan tanggapan.
- c. **Metode studi kasus**, yaitu suatu metode pembelajaran yang mana para peserta diarahkan untuk mendalami suatu kasus yang spesifik agar dapat melakukan diagnosa guna menemukan cara penyelesaiannya. Metode ini seringkali didukung dengan kunjungan/observasi lapang
- d. **Metode eksursi**, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap kondisi real di lapangan baik untuk keperluan orientasi, pengambilan data, maupun eksplorasi.

2. Pendekatan Non Tatap Muka

Instruktur/ pengajar/ nara sumber tidak bertemu dengan para peserta (kelompok sasaran). Materi pendidikan atau isu lingkungan yang diangkat umumnya disampaikan secara tertulis atau visual melalui tulisan populer, artikel, majalah, buku, iklan layanan masyarakat, lagu, film, dan sejenisnya yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat umum.

KONFIGURASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PKN

Merujuk pada Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 secara normatif dikemukakan bahwa "Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi **warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.**" Sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas, "adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (Naskah Akademik kurikulum PKN:2007)

1. **Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan**
2. **Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas** dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi
3. **Berkembang secara positif dan demokratis** untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. **Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia** secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi." Sementara itu ditetapkan pula bahwa "Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan

pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.

Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. **Persatuan dan Kesatuan bangsa**, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan
2. **Norma, hukum, dan peraturan**, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
3. **Hak asasi manusia** meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan

- internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
4. **Kebutuhan warga negara** meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
 5. **Konstitusi Negara** meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
 6. **Kekuasan dan Politik**, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
 7. **Pancasila** meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
 8. **Globalisasi** meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan budaya dan karakter memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab Mampu menjelaskan Pengantar Pendidikan lingkungan Hidup (Puskur, 2010: 9-10).
 1. *Materi Pendidikan lingkungan hidup adalah konsep-konsep implementasi yang merupakan jabaran dari nilai Pancasila dan UUD 45 beserta dinamika perwujudan dalam pendidikan dan pengelolaan lingkungan.*
 2. *Sasaran belajar akhir Pendidikan lingkungan hidup adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup.*
 3. *Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat afektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku).*

Sebagai pengayaan teoritik, pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam PKn tersebut, dalam pandangan Lickona (1992) disebut "*educating for character*" atau "pendidikan watak". Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50-51), yakni *Compatible mix of all those virtues identified by religions traditions, literary stories, the sages, and persons of common sense down through history*. Artinya suatu perpaduan yang harmonis dari berbagai *kebajikan* yang tertuang dalam *keagamaan*, sastra, pandangan kaum cerdik-pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman. Oleh karena itu Lichona (1992, 51) memandang karakter atau

watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni *moral knowing*, *moral feeling*, and *moral behavior* atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral.

Ketiga unsur tersebut adalah tiga aspek yang ditumbuhkan dalam pendidikan kewarganegaraan sehingga konfigurasi yang terbentuk dalam pendidikan lingkungan hidup meliputi:

Konsep Moral

1. Kesadaran perlunya sikap peduli lingkungan dalam kehidupan
2. Pemahaman tentang peduli lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Manfaat peduli lingkungan di masa sekarang dan masa yang akan datang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
4. Alasan perlunya peduli lingkungan
5. Bagaimana cara menerapkan peduli lingkungan
6. Penilaian diri sendiri mengenai peduli lingkungan

Sikap Moral

1. Kata hati kita tentang peduli lingkungan
2. Niat yang dibarengi Rasa percaya diri kita untuk peduli lingkungan
3. Empati kita terhadap orang yang peduli lingkungan
4. Cinta kita terhadap peduli lingkungan kejujuran
5. Penghargaan diri kita untuk peduli lingkungan

Perilaku Moral

1. Kemampuan peduli lingkungan
2. Kemauan untuk peduli lingkungan
3. Kebiasaan untuk selalu peduli lingkungan

Peran pendidikan lingkungan memiliki arti penting untuk

meningkatkan kesadaran, individu dan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar tercipta lingkungan yang berkualitas. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama menteri nomor: Kep No.07/MenLH/06/2005, No.05/VIKB/2005 bahwa untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup sangat penting untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang sudah ada atau menyusun muatan kurikulum lokal sendiri.

Bahwa karakter adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain. Bahwa karakter peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan yakni *civic education* dan *citizenship education*. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives", atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk

mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (Dasim & Winata Putra, 2010) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen”.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process*. PKn dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.

Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti tersebut, PKn dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sedangkan dalam Pasal 4 Keputusan Dirjen Dikti tersebut menyebutkan bahwa tujuan PKn di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara republik Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Mempupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Selanjutnya bagaimana strategi PKn untuk pembangunan karakter bangsa? Mengutip pendapat Winataputra (2005), agar paling PKn dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, tiga hal perlu kita cermati, yaitu “*curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment*”.

Pada saat bersamaan lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi “*spiral global classroom*” (CICED, 1999:7). Dengan demikian kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoks antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Perlu disadari bahwa pembangunan karakter

merupakan tugas dari semua pihak, mulai dari unsur sekolah (lembaga pendidikan), orang tua, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama antara sekolah (lembaga pendidikan) dengan orang tua dan sekolah (lembaga pendidikan) dengan lingkungan masyarakat. Sehingga melalui kerjasama tersebut tidak akan terjadi lempar tanggung jawab kewenangan untuk melakukan pembinaan karakter, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Semua komponen merasa bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan karakter.

PENUTUP

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bahan ajar yang mengembangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara yang sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik serta kepekaan mengembangkan jati diri moral dan bangsa dengan menjaga dan peduli lingkungan hidup.

Latar belakang permasalahan pendidikan lingkungan hidup yang ada selama ini dan sejalan dengan filosofi pembangunan berkelanjutan yang menekankan bahwa pembangunan harus dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang serta melestarikan dan mempertahankan fungsi lingkungan dan daya dukung ekosistem. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan budaya dan karakter memiliki nilai-nilai budaya dan karakter

bangsa yang meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab Mampu menjelaskan Pengantar Pendidikan lingkungan Hidup

Bahwa karakter adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain. bahwa karakter peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti Thamrin. 2012. Blog "*Pendidikan lingkungan Hidup*", FKIP, UNS
- Arief Hidayat & Adji Samekto. 1998. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif global dan Nasional*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Dasim Budimansyah & Winata Putra. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Modul Universitas Terbuka,
- Depdiknas. 2006. *Standar Kompetensi Muatan Lokal PLH SD*. Bandung
- Fakih, Mansour. (2011). *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giroux, Henry. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. New York: Bergin and Garvey.
- Kementrian Lingkungan Hidup. *Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup*. <http://www.menlh.go.id>
- Margolis, Eric (ed). (2001). *The Hidden Curriculum in Higher Education*. New York & London: Routledge.
- Sri Hendriyati, Pendidikan Lingkungan Hidup dan aplikasinya dalam pembelajaran bagi siswa sekolah dasar, Bandung, 2011
- Topatimasang, Roem., Rahardjo, Toto & Fakih, Mansour. (2010). *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist Press
- Winarno, PKn berbasis kearifan lokal, Jurnal PKn Progresif, 2011